

## ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN PERGESERAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI

**Junaedi Arifin<sup>1</sup>, Hasrul Wijaya<sup>2</sup>, Muh. Ramli<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Mega Buana Palopo  
Email: [edhyarsy@gmail.com](mailto:edhyarsy@gmail.com)

**Abstract:** *The aims of this research are: (1) analyse the growth classification of economic sectors in the Wajo Regency 2011-2015; (2) analyse the basic sector of the economy in the Wajo Regency 2011-2015; (3) analysing the share and shift in the economy sector Wajo Regency 2011-2015. This study uses secondary data obtained from BPS-Statistics South Sulawesi Province, BPS Statistics Wajo, and Department of Planning and Regional Development Wajo. Data were analyzed using Klassen Typology analysis, Location Quotient, and Shift-Share Analysis. The results of this research show that: (1) Sector classified as an developed sector in the Wajo Regency is the of Agriculture, Forestry and Fisheries, and sector mining and excavation, (2) sectors is a basic sector in Wajo Regency is the sector of Agriculture, Forestry and Fisheries, sector mining and excavation, sector Procurement Electricity and Gas, the sector of Wholesale and Retail, Car Repair and Motorcycles, (3) The structure of in the Wajo Regency 2011-2015 start forward to slide in economic sector from primer sector to seconder sector, (4) The sectors that have competitive advantages in Wajo are sectors of Agriculture, Forestry and Fisheries, sector Procurement Electricity and Gas, construction sector, sectors Transportation and Warehousing, sector Provision of Accommodation and Food Drink, the Financial Services sector and the insurance sector, Real Estate sector, service sector Corporate sector Public Administration, defense and Social Security Mandatory, and sector service of education.*

**Keywords:** *Klassen typology; Location quotient; Shift share*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Wajo tahun 2011-2015; (2) menganalisis sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Wajo tahun 2011-2015; (3) menganalisis pola perubahan dan pergeseran sektor dalam perekonomian Kabupaten Wajo tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten Wajo dan Bappeda Kabupaten Wajo. Data dianalisis dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, analisis Location Quotient dan Analisis Shift Share. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sektor yang terklasifikasi sebagai sektor maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Wajo adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian, (2) Sektor-sektor yang merupakan sektor basis dan mempunyai keunggulan komparatif di Kabupaten

Wajo adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan Listrik dan gas, dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, (3) Struktur Perekonomian Kabupaten Wajo tahun 2011-2015 mulai bergerak maju menuju pergeseran sektor ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder. (4) Sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Wajo adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pengadaan Listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa Pendidikan, dan sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial.

**Kata Kunci:** Tipologi klassen; *Location quotient*; *Shift share*

## 1. LATAR BELAKANG

Hakikat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan kebijakan pemerintah dan swasta dalam mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Masalah pokok dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada kekhasan daerah (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (Badrudin Rudy, 2012:5).

Pada tahun 2001, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Mulai saat itu, pemerintahan dan pembangunan daerah lama yang sangat sentralisasi dan didominasi oleh pemerintah pusat mulai ditinggalkan. Sedangkan pemerintah daerah diberikan wewenang dan sumber keuangan baru untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong pula proses pembangunan nasional (Sjafrizal, 2015:105).

Berdasarkan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tersebut, Pemerintah Daerah harus memiliki kejelian dalam menganalisis potensi ekonomi di wilayahnya. Hal ini terkait dengan kewajibannya di satu sisi menentukan sektor-sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan disisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat sektor tertentu dan menentukan sektor-sektor mana yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang. Pemerintah Daerah juga perlu menentukan sektor mana pada daerah yang menjadi sektor basis atau unggulan dibanding daerah lainnya. Dengan demikian pembangunan dapat diarahkan pada pembangunan dan pembinaan keunggulan dimasa yang akan datang.

Saat ini untuk menentukan keberhasilan pembangunan di era otonomi lagi hanya diukur dari kemajuan fisik yang diperoleh atau seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima. Akan tetapi keberhasilan pembangunan harus dapat diukur dengan parameter yang lebih luas dan lebih strategis yang meliputi semua aspek kehidupan. Agar dapat memenuhi harapan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus dimulai berdasarkan prioritas dan pengidentifikasian sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif yang berdampak positif untuk meningkatkan perekonomian daerah. Untuk mengidentifikasi hal tersebut maka dilakukan berbagai pendekatan model perencanaan pembangunan untuk menentukan arah dan kebijakan yang diambil, salah satunya yaitu pendekatan sektoral. Pendekatan ini sangat diperlukan karena dapat memberikan gambaran tentang keunggulan yang dimiliki wilayah tersebut yang berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya. Oleh karena itu analisis dan identifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif bagi setiap kabupaten/kota sangat penting dilakukan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Keunggulan Komparatif**

Suatu negara melakukan perdagangan dengan negara lain karena didasari oleh alasan-alasan yang logis. Suatu negara tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan dalam negerinya dengan hasil produksinya sendiri karena kebutuhan masyarakat yang sangat

kompleks sedangkan barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan terbatas. Hal ini disebabkan sumber daya yang terbatas pada masing-masing negara. Negara-negara di dunia ini mempunyai kepemilikan sumber daya yang berbeda-beda jumlah dan kualitasnya sehingga mendorong negara tersebut untuk melakukan perdagangan dengan negara lain agar kebutuhan dalam negerinya dapat terpenuhi dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah dan perdagangan internasional diharapkan dapat memperoleh keuntungan bagi masing-masing negara yang terlibat di dalamnya.

Istilah *comparative advantage* (keunggulan komparatif) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo sewaktu membahas perdagangan antara dua negara. Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara yang saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengeksport barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan komparatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Ternyata ide tersebut tidak hanya bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional.

Keunggulan komparatif suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Apabila keunggulan itu adalah dalam bentuk nilai tambah riil maka dinamakan keunggulan absolut. Komoditi yang memiliki keunggulan walaupun hanya dalam bentuk perbandingan, lebih menguntungkan untuk dikembangkan dibanding dengan komoditi lain yang sama-sama diproduksi oleh kedua negara atau daerah.

Teori keunggulan komparatif dari David Ricardo (Salvatore dalam Zakaria, 2008) menjelaskan bahwa nilai atau harga suatu komoditas ditentukan oleh nilai tenaga kerja. Nilai tenaga kerja itu ditentukan oleh waktu dan jam kerja yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang. Menurut teori ini, harga suatu barang diasumsi ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Pernyataan ini memberi indikasi bahwa: 1) Tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi, 2) Tenaga kerja bersifat homogeny. Dalam pengembangan teorinya, David Ricardo membuat asumsi-asumsi: 1) hanya

terdapat dua negara dan dua komoditi, perdagangan bersifat bebas, 2) terdapat mobilitas tenaga kerja yang sempurna di dalam negara, 3) biaya produksi konstan, 4) tidak terdapat biaya transportasi, 5) tidak ada perubahan teknologi, 6) menggunakan teori nilai tenaga kerja.

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi keunggulan komparatif suatu negara, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tersedianya faktor produksi dalam macam atau jumlah yang berbeda antara negara satu dengan yang lain.
- b. Adanya kenyataan bahwa dalam cabang-cabang produksi tertentu orang bisa memproduksi secara lebih efisien (lebih murah) apabila skala produksi semakin besar.
- c. Adanya perbedaan dalam corak dan laju kemajuan teknologi.

Sementara itu Teori Hackscher-Ohlin (Lantemona, 2014) lebih menunjukkan tindakan suatu negara yang tidak memiliki sumber daya alam. Suatu negara bisa memiliki lebih sedikit faktor produksi seperti sumber daya alam dibanding negara lain. Namun, dengan adanya hal itu, suatu negara akan melakukan usaha agar roda perdagangan di negara tersebut stabil walaupun tidak memiliki sumber daya alam. Contoh negara yang menggunakan teori HO yaitu Jepang. Jepang bukan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga Jepang melakukan usaha dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh Jepang. Itu pun membuktikan bahwa Jepang memiliki keunggulan kompetitif (daya saing) dengan negara lain. Contohnya saat ini Jepang lebih banyak menciptakan produk otomotif maupun teknologi dan melakukan ekspor sehingga menjadi negara yang surplus.

## **2.2 Konsep Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas. Secara tradisional pembangunan dipandang sebagai suatu fenomena ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Persepektif mengenai tujuan dan makna pembangunan kemudian berkembang menjadi lebih luas lagi. Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di

dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, indikator pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDRB maupun PDRB perkapita, tetapi juga indikator lainnya seperti ketenagakerjaan, pendidikan, distribusi pendapatan, jumlah penduduk miskin. Hal ini sesuai dengan paradigma pembangunan modern yang mulai mengedepankan pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, serta penurunan tingkat pengangguran (Todaro & Smith, 2006).

Sebelum dekade 1960-an, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya hingga mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. Pengertian ini sangat bersifat ekonomis. Namun demikian, pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan karena pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan GNP saja tidak akan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan secara mendasar di negara sedang berkembang. Hal ini tampak pada taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat di negara sedang berkembang yang tidak mengalami perbaikan meskipun target pertumbuhan GNP per tahun telah tercapai. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi secara sempit (Arsyad, 2010).

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010). Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (1) Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu; (2) Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita; (3) Peningkatan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang; dan (4) Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya).

### **2.3 Sektor-sektor Ekonomi**

Badan Pusat Statistik (2015) mengemukakan bahwa untuk kepentingan perhitungan nasional maupun regional, perekonomian Indonesia dibagi ke dalam 17 (tujuh belas) sektor menurut lapangan usaha baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010, yaitu:

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsistem) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

b. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

c. Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan dan hasil hutan lainnya.

d. Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacean, Mollusca, rumput laut dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam dan sawah).

e. Pertambangan dan Penggalian

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan

minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

f. **Industri Pengolahan**

Secara garis besar Badan Pusat Statistik (2015) membedakan kelompok industri pengolahan menjadi:

- 1) Industri pengolahan batubara dan pengilangan minyak dan gas bumi
- 2) Industri makanan dan minuman
- 3) Industri pengolahan tembakau
- 4) Industri tekstil dan pakaian jadi
- 5) Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki
- 6) Industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman
- 7) Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan reproduksi media rekam
- 8) Industri kimia, farmasi dan obat tradisional
- 9) Industri karet, barang dari karet, dan plastik
- 10) Industri barang galian bukan logam
- 11) Industri logam dasar
- 12) Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik
- 13) Industri mesin dan perlengkapan
- 14) Industri alat angkutan
- 15) Industri furnitur
- 16) Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi, dan pemasangan mesin dan peralatan

g. **Pengadaan Listrik dan Gas**

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es.

h. **Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang**

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat

atau bukan baik rumah tangga ataupun industri yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.

i. **Konstruksi**

Kategori konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri. Yang digolongkan sebagai kegiatan konstruksi disini adalah pembuatan bangunan, pemasangan dan perbaikan (berat maupun ringan) semua jenis konstruksi seperti: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, jalan, jembatan, pelabuhan (laut, udara, sungai), terminal dan sebagainya (Badan Pusat Statistik, 2015).

j. **Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

k. **Transportasi dan Pergudangan**

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori transportasi dan pergudangan terdiri atas: angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, bandara, pergudangan, dan lain-lain. (Badan Pusat Statistik, 2015)

l. **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

m. **Informasi dan Komunikasi**

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu penerbitan, produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemrograman (Radio dan Televisi), telekomunikasi, pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi (Badan Pusat Statistik, 2015).

n. **Jasa Keuangan dan Asuransi**

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup

kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

o. Real Estate

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

p. Jasa Perusahaan

Kategori jasa perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum.

q. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib. (Badan Pusat Statistik, 2015).

r. Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan

penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat..

s. **Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa rumah sakit, jasa klinik, jasa rumah sakit lainnya, praktik dokter, jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, jasa pelayanan kesehatan tradisional, jasa pelayanan penunjang kesehatan, jasa angkutan khusus pengangkutan orang sakit, jasa kesehatan hewan, jasa kegiatan sosial.

t. **Jasa Lainnya**

Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, hiburan dan rekreasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, jasa perorangan yang melayani rumah tangga, kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, jasa swasta lainnya termasuk kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain. (Badan Pusat Statistik, 2015)

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian atau dengan mengambil dari sumber lain yang diterbitkan oleh lembaga yang dianggap berkompeten. Untuk mencapai tujuan serta menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka digunakan tiga macam metode analisis, yaitu Analisis Tipologi

Klassen, Analisis Location Quotient dan Analisis Shift Share.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. HASIL

#### 4.1.1 Analisis Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kabupaten Wajo

Untuk mengklasifikasikan pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Wajo, digunakan analisis Tipologi Klassen. Analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan laju pertumbuhan ( $s_i$ ) dan kontribusi sektoral ( $sk_i$ ) di Kabupaten Wajo dengan laju pertumbuhan ( $s$ ) dan kontribusi sektoral ( $sk$ ) di Provinsi Sulawesi Selatan. Tipologi Klassen membedakan pertumbuhan sektor ekonomi menjadi empat klasifikasi yaitu sektor maju dan tumbuh pesat, sektor maju tapi tertekan, sektor potensial atau masih dapat berkembang, dan sektor relatif tertinggal. Dalam penelitian ini untuk Kabupaten Wajo digunakan data PDRB. Berikut hasil pengolahan data berupa laju pertumbuhan dan kontribusi sektoral di Kabupaten Wajo dan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 – 2015.

**Tabel 1.**  
**Klasifikasi Sektor Pembentuk PDRB Kab. Wajo Tahun 2011-2015**  
**Menurut Tipologi Klassen**

Kontribusi Laju Pertumbuhan	$sk_i > sk$	$sk_i < sk$
$s_i > s$	<p><b>Kuadran I</b>                      Sektor yang maju dan tumbuh pesat (<i>developed sector</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</li> <li>b. Pertambangan dan Penggalian</li> </ol>	<p><b>Kuadran III</b>                      Sektor potensial atau masih dapat Berkembang (<i>developing sector</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan Listrik dan Gas</li> <li>b. Konstruksi</li> <li>c. Transportasi dan Pergudangan</li> <li>d. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</li> <li>e. Jasa Perusahaan</li> <li>f. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</li> <li>g. Jasa Pendidikan</li> <li>h. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</li> <li>i. Jasa Lainnya</li> </ol>
$s_i < s$	<p><b>Kuadran II</b>                      Sektor maju tapi tertekan (<i>stagnant sector</i>):</p> <p>Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</p>	<p><b>Kuadran IV</b>                      Sektor relatif tertinggal (<i>underdeveloped sector</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Industri Pengolahan</li> <li>b. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</li> <li>c. Informasi dan Komunikasi</li> <li>d. Jasa Keuangan dan asuransi</li> </ol>

Dari hasil analisis Tipologi Klassen pada Tabel 1 tersebut di atas, sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sektor yang maju dan tumbuh pesat (*developed sector*)

Sektor ekonomi di Kabupaten Wajo yang termasuk dalam klasifikasi sektor yang maju dan tumbuh pesat selama tahun 2011-2015 yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor Pertambangan dan Penggalian. Hal ini berarti sektor-sektor tersebut di Kabupaten Wajo mempunyai laju pertumbuhan dan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Sektor maju tapi tertekan (*stagnant sector*)

Sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo yang termasuk dalam klasifikasi sektor maju tapi tertekan selama tahun 2011-2015 adalah serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini berarti bahwa sektor-sektor tersebut di Kabupaten Wajo mempunyai laju pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi mempunyai kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Sektor potensial atau masih dapat berkembang (*developing sector*)

Sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 2011-2015 sebagian besar termasuk dalam klasifikasi sektor ini. Adapun sektor-sektor tersebut adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Konstruksi, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa Lainnya. Hal ini berarti bahwa sektor-sektor tersebut di Kabupaten Wajo mempunyai laju pertumbuhan sektor yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi memiliki kontribusi sektoral yang lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan.

d. Sektor relatif tertinggal (*underdeveloped sector*)

Sektor-sektor di Kabupaten wajo yang diklasifikasikan sebagai sektor relatif

tertinggal dalam kurun waktu tahun 2011-2015 adalah sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Ini artinya bahwa sektor-sektor tersebut di Kabupaten Wajo baik dari segi laju pertumbuhan maupun kontribusinya terhadap PDRB lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan.

#### 4.1.2 Analisis Keunggulan Komparatif di Kabupaten Wajo

Untuk mengetahui sektor-sektor yang mempunyai keunggulan komparatif dalam perekonomian Kabupaten Wajo, digunakan analisis *Location Quotient* (LQ). Penentuan sektor yang mempunyai keunggulan komparatif dengan analisis LQ dilakukan dengan mengkomparasikan antara peranan atau kontribusi suatu sektor dalam perekonomian suatu daerah dengan peranan atau kontribusi sektor yang sama dalam perekonomian daerah yang lebih tinggi tingkatannya yaitu perekonomian provinsi atau nasional. Dalam penelitian ini, untuk menentukan sektor unggul (basis) sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo, maka kontribusi sektor dalam perekonomian Kabupaten Wajo dikomparasikan dengan kontribusi sektor yang sama dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk wilayah Kabupaten Wajo, data yang digunakan adalah data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010. Suatu sektor dikatakan unggul (basis) dan berpotensi sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Wajo apabila nilai  $LQ > 1$ . Sebaliknya, sektor dikatakan tidak unggul (*nonbasis*) dan kurang berpotensi sebagai penggerak perekonomian apabila nilai  $LQ < 1$ . Berikut hasil perhitungan LQ Kabupaten Wajo tahun 2011 – 2015.

**Tabel 2.**  
**Nilai LQ Kabupaten Wajo Tahun 2011-2015**

Sektor	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,34	1,41	1,45	1,42	1,41	1,41	Basis
Pertambangan dan Penggalian	3,79	3,56	3,47	3,55	3,60	3,60	Basis
Industri Pengolahan	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	Non Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	1,14	1,09	1,14	1,02	1,15	1,11	Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	Non Basis
Konstruksi	0,67	0,73	0,74	0,72	0,72	0,71	Non Basis

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,09	1,10	1,09	1,08	1,07	1,09	Basis
Transportasi dan Pergudangan	0,83	0,82	0,85	0,88	0,88	0,85	Non Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	Non Basis
Informasi dan Komunikasi	0,29	0,28	0,28	0,27	0,28	0,28	Non Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,65	0,67	0,69	0,67	0,67	0,67	Non Basis
Real Estate	0,76	0,80	0,86	0,86	0,87	0,83	Non Basis
Jasa Perusahaan	0,22	0,24	0,26	0,26	0,26	0,25	Non Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,80	0,85	0,88	0,86	0,86	0,85	Non Basis
Jasa Pendidikan	0,57	0,59	0,62	0,61	0,61	0,60	Non Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,63	0,65	0,64	0,63	0,63	Non Basis
Jasa Lainnya	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	Non Basis

Berdasarkan Tabel 2 nilai LQ Kabupaten Wajo tersebut dengan menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 selama kurun waktu 2011 – 2015, terlihat dengan jelas sektor-sektor yang menjadi sektor basis dan non basis. Sebagian besar sektor ekonomi di Kabupaten Wajo merupakan sektor non basis, dan hanya terdapat empat sektor yang merupakan sektor basis. Sektor basis dengan perolehan nilai rata-rata LQ tertinggi yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,60 yang artinya bahwa nilai tambah sektor Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Wajo lebih besar 3,6 kali dibandingkan dengan nilai tambah sektor sejenis di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki peranan terbesar sebagai penunjang aktivitas ekonomi di Kabupaten Wajo.

Sektor basis berikutnya yang memiliki nilai LQ yang tinggi setelah sektor Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Wajo adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan perolehan nilai LQ rata-rata sebesar 1,41, sektor pengadaan listrik dan gas dengan perolehan nilai LQ rata-rata sebesar 1,11, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan perolehan nilai LQ rata-rata sebesar 1,09. Sektor-sektor yang menjadi sektor basis tersebut menggambarkan bahwa hasil produksi barang dan jasa sektor tersebut dapat melayani pasar baik di dalam maupun di luar Kabupaten wajo, serta sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten wajo selama tahun 2011-2015. Oleh karena itu, di periode-periode berikutnya sektor-sektor basis ini perlu terus dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi yang semakin signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo melalui peningkatan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wajo.

Adapun sektor yang merupakan sektor non basis di Kabupaten Wajo selama periode analisis tahun 2011 – 2015 adalah sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan perolehan nilai LQ rata-rata masing-masing adalah 0,83, kemudian menyusul sektor Real Estate (0,83), sektor Konstruksi (0,71), sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (0,67), sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,63), sektor Jasa Pendidikan (0,60), sektor Jasa Lainnya (0,31), sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,30), sektor Informasi dan Komunikasi (0,28), sektor Industri Pengolahan (0,26), sektor Jasa Perusahaan (0,25), dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,24).

Sektor non basis di Kabupaten Wajo menggambarkan bahwa sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan lokal di wilayah Kabupaten Wajo, bahkan ada kecenderungan untuk melakukan impor dari luar Kabupaten Wajo. Oleh karena itu, sektor-sektor tersebut harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah agar dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya yang pada akhirnya dapat menjadi sektor basis (unggul) baru di Kabupaten Wajo.

#### 4.1.3 Analisis Perubahan dan Pergeseran Sektor Ekonomi di Kabupaten Wajo

Untuk mengetahui pertumbuhan dan pergeseran sektor dalam perekonomian Kabupaten Wajo digunakan analisis *Shift Share*. Analisis *Shift Share* mengasumsikan bahwa pertumbuhan PDRB suatu daerah ditentukan oleh komponen *Share (Provincial Share/PS)*, dan komponen *Shift (Proportional Shift (P) dan differential Shift (D))*. Hasil analisis *Shift Share* Kabupaten Wajo tahun 2011-2015 dengan menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 ditunjukkan pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3.**  
**Analisis *Sift Share* Kabupaten Wajo Tahun 2011-2015**  
**(Milyar Rupiah)**

Sektor	PS	P	D	ΔE
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	773,78	-89,47	127,06	811,37
Pertambangan dan Penggalian	614,51	49,72	-159,28	504,95
Industri Pengolahan	91,04	22,28	-22,20	91,12
Pengadaan Listrik dan Gas	2,46	0,36	0,02	2,84
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,12	-0,68	-0,23	0,21
Konstruksi	195,57	60,66	54,13	310,36

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	375,05	104,05	-55,33	423,77
Transportasi dan Pergudangan	78,91	1,21	17,92	98,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,68	1,13	1,87	10,68
Informasi dan Komunikasi	39,66	34,38	-10,43	63,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	53,84	21,99	4,13	79,96
Real Estate	67,72	18,79	43,04	129,55
Jasa Perusahaan	2,42	0,04	1,69	4,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	106,96	-47,40	25,13	84,69
Jasa Pendidikan	79,38	-1,38	24,08	102,08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28,13	12,41	2,62	43,16
Jasa Lainnya	9,82	1,76	-0,39	11,19
<b>Jumlah</b>	<b>2.528,06</b>	<b>189,85</b>	<b>53,83</b>	<b>2.771,73</b>

Dari Tabel 3 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu tahun 2011 – 2015, PDRB Kabupaten Wajo mengalami pertumbuhan ( $\Delta E$ ) sebesar 2.771,73 miliar rupiah. Nilai pertumbuhan PDRB yang positif ini berarti selama periode tersebut kinerja perekonomian Kabupaten Wajo mengalami peningkatan. Jika ditinjau secara sektoral, tampak bahwa seluruh sektor di Kabupaten Wajo selama periode tersebut juga mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai  $\Delta E$  pada seluruh sektor yang positif. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor di Kabupaten Wajo yang mengalami pertumbuhan terbesar yang mencapai 811,37 miliar rupiah.

Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan besar berturut-turut adalah sektor Pertambangan dan Penggalan dengan nilai pertumbuhan sebesar 504,95 miliar rupiah, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai pertumbuhan sebesar 423,77 miliar rupiah, sektor Konstruksi dengan nilai pertumbuhan sebesar 310,36 miliar rupiah, serta sektor Real Estate dengan nilai pertumbuhan sebesar 129,55 miliar rupiah.

## 4.2. PEMBAHASAN

Pertumbuhan total PDRB Kabupaten Wajo pada periode tahun 2011 – 2015 dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (PS). Nilai PS menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo yang terjadi jika diasumsikan perekonomian Kabupaten Wajo tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang sama dengan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan tabel tersebut,

nilai komponen PS Kabupaten Wajo sebesar 2.528,06 miliar rupiah. Nilai komponen PS yang positif berarti pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo. Jika dibandingkan tampak bahwa nilai pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo lebih besar dari nilai PS. Ini berarti terjadi selisih yang positif, menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 8,05 persen, sedangkan pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan selama periode yang sama adalah sebesar 7,86 persen.

Secara sektoral, komponen PS Kabupaten Wajo seluruhnya bernilai positif yang artinya pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan menyebabkan terjadinya peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang memperoleh manfaat terbesar dari pengaruh pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yaitu mencapai 773,78 miliar rupiah. Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan besar sebagai akibat dari pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan berturut-turut adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai pertumbuhan sebesar 614,51 miliar rupiah, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai pertumbuhan sebesar 375,05 miliar rupiah, sektor Konstruksi dengan nilai pertumbuhan sebesar 195,57 miliar rupiah, setkor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai pertumbuhan sebesar 106,96 miliar rupiah. Adapun sektor di Kabupaten Wajo yang mengalami pertumbuhan paling kecil akibat pengaruh pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,12 miliar rupiah.

Selain komponen pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (PS), pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo selama periode 2011 – 2015 juga dipengaruhi oleh komponen bauran industri/Proportional Shift (P) dan komponen daya saing atau biasa disebut dengan keunggulan kompetitif/Differential Shift (D). Komponen bauran industri mengukur besarnya pertumbuhan relatif suatu sektor di Provinsi Sulawesi Selatan dibandingkan dengan total pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan,

yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor yang sama di Kabupaten Wajo. Nilai P yang positif menunjukkan bahwa sektor tertentu di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan yang lebih besar dari pertumbuhan total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sehingga memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan sektor yang sama di Kabupaten Wajo, sebaliknya nilai P yang negatif menunjukkan bahwa sektor tertentu di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan yang lebih kecil dari pertumbuhan total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sehingga memberikan kontribusi yang negatif terhadap pertumbuhan sektor yang sama di Kabupaten Wajo.

Komponen daya saing daerah menunjukkan tingkat kompetisi suatu setkor di Kabupaten Wajo dibandingkan dengan pertumbuhan sektor tersebut di Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai D yang positif menunjukkan bahwa sektor di Kabupaten Wajo mengalami pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga sektor tersebut dikatakan memiliki keunggulan kompetitif, sebaliknya nilai D yang negatif menunjukkan bahwa sektor di Kabupaten Wajo mengalami pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga sektor tersebut dikatakan tidak memiliki keunggulan kompetitif.

Dari tabel 3 tersebut di atas komponen bauran industri (P) Kabupaten Wajo sebesar 189,85 miliar rupiah. Nilai P yang positif mengidentifikasi bahwa secara umum pertumbuhan PDRB sektoral di Provinsi Sulawesi Selatan lebih besar dari pertumbuhan total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga menyebabkan peningkatan pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo. Secara sektoral, dapat dilihat bahwa sebagian besar sektor ekonomidi Kabupaten Wajo mempunyai nilai P yang positif, dan hanya terdapat empat sektor yang mempunyai nilai P yang negatif.

Sektor-sektor yang mempunyai nilai komponen P yang positif berarti sektor-sektor tersebut di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor yang sama di Kabupaten Wajo. Sektor-sektor di Kabupaten Wajo yang memperoleh manfaat terbesar sebagai akibat dari pengaruh bauran industri adalah sektor Perdagangan Besar

dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai pertumbuhan sebesar 104,05 miliar rupiah. Selanjutnya sektor Konstruksi dengan nilai pertumbuhan sebesar 60,66 miliar rupiah, sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai pertumbuhan sebesar 49,72 miliar rupiah, sektor Informasi dan Komunikasi dengan nilai pertumbuhan sebesar 34,38 miliar rupiah, dan sektor Industri Pengolahan dengan nilai pertumbuhan sebesar 22,28 miliar rupiah.

Pengaruh daya saing (D) terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo berdasarkan hasil analisis Shift Share bernilai 53,83 miliar rupiah. Nilai yang positif ini mengindikasikan bahwa secara umum sektor-sektor di Kabupaten Wajo tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor-sektor di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyebabkan sektor-sektor di Kabupaten Wajo memiliki daya saing atau memiliki keunggulan kompetitif. Namun demikian secara sektoral dapat dilihat bahwa terdapat lima sektor yang memiliki nilai D yang negatif, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Informasi dan Komunikasi, dan sektor jasa lainnya. Nilai D yang negatif mengidentifikasikan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang tidak memiliki keunggulan kompetitif.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa, sektor yang terklasifikasi sebagai sektor maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Wajo adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor Pertambangan dan Penggalian. Artinya, kedua sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan dan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sektor-sektor yang merupakan sektor basis atau mempunyai keunggulan komparatif di Kabupaten Wajo adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dan sektor

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif (D) di Kabupaten Wajo adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Konstruksi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estate, Sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Mengacu pada hasil penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Wajo dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi di Kabupaten Wajo adalah kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Wajo perlu diarahkan kepada pengembangan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan tidak mengesampingkan pengembangan sektor-sektor lain sebagai pendukung. Prioritas pengembangan sektor ini diharapkan dapat menstimulus pembangunan perekonomian di Kabupaten Wajo yang nantinya akan menarik perkembangan atau kemajuan sektor lain yang menjadi pendukungnya.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai salah satu sektor basis yang memberikan kontribusi rata-rata terbesar di Kabupaten Wajo perlu dikembangkan lagi. Hal ini karena letak wilayah Kabupaten Wajo yang berpotensi menjadi daerah penyangga bagi daerah lainnya terutama di wilayah pantai sebagai jalur menuju Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian, dibutuhkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Wajo agar generasi muda siap menghadapi pergeseran sektor ekonomi yang mulai bergerak dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga pergeseran sektor ekonomi tersebut dapat mengurangi jumlah pengangguran dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Wajo, seperti sektor pertanian yang menjadi mata pencarian utama sebagian besar penduduk di Kabupaten Wajo.

Masih ada beberapa sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo saat ini tidak memiliki keunggulan kompetitif. Oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan

pembangunan yang tepat untuk dapat meningkatkan kinerja sektor-sektor tersebut di masa mendatang sehingga dapat menjadi sektor yang kompetitif, serta sebagai penggerak dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo. 2015. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wajo*. Sengkang.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Dangkeng, A., Ramli, M., & Nurfaisah, N. (2023). Cost of Production to Determine Selling Price in Gowa Jaya Cake. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 5(1), 17-23.
- Hidayat, A. (2021). Analisis perbedaan financial literacy berdasarkan perspektif gender (Studi kasus pada nasabah PT. Bank BNI Persero Tbk. Cabang Parepare). *YUME: Journal of Management*, 4(3).
- Jhingan M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- John Glasson. 1990. *Pengenalan Perancangan Wilayah Konsep dan Amalan (Ahli bahasa Haris Yaakup)*. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Lantemona, A., Kalangi, JB dan Naukoko, A. 2014. Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 14 (3), hal. 15-29.
- Mariana, L., & Ramli, M. (2022). The Effect of Communication and Motivation on Employee Performance at PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Hertasing Post. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(3), 259-267.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Edisi Pertama. Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram.
- Narbuko, C., dan Achmadi, H. A. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ramli, M. (2024). Pengaruh strategi bersaing dan marketing terhadap pendapatan pedagang telur di pasar sentral kota palopo. *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 7(8).
- Ramli, M., Dangkeng, A., Pertiwi, H., & Fausiah, R. (2023). Analysis of Factors Affecting Income and Order Levels of Online Motorcycle Taxis During the Pandemic Case Study of Grab and Gojek Online Ojek
- Ramli, M. (2019). Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Pengrajin Tenun Di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. *Economix*, 7(2), 96-107.

- Ramli, M., Dangkening, A., Pertiwi, H., & Fausiah, R. (2023). Analysis of Factors Affecting Income and Order Levels of Online Motorcycle Taxis During the Pandemic Case Study of Grab and Gojek Online Ojek Drivers In palopo City. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 7(1), 134-138.
- Ramli PT. London Sumatera (Perusahaan Ekspor Karet) Di Bulukumba. *MANDAR: Management Development and Applied Research Journal*, 2(1), 8-16.
- Suwandi, S., Dangkening, A., & Ramli, M. (2022). Pelatihan Dan Pendampingan Pembuatan Produk Olahan Sagu. *Mega Buana Journal of Innovation and Community Service*, 1(1), 1-4.
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Subandi. 2014. *Ekonomi Pembangunan*. Cetakan Ketiga. Alfabeta, Bandung.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Habibie, S., & Ramli, M. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Berwirausaha Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada Pelaku Usaha Pasar Sentral Kota Palopo). *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 7(9).
- Tambunan. 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia Teori dan Penemuan Empiris*. Salemba Empat, Jakarta.
- Tahir, S., & Ramli, M. (2024). Pengaruh Job Description dan Sistem Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. *Management and Accounting Research Statistics*, 4(3), 33-43.